

Collaborative Governanve dalam Penanganan Darurat Sampah di Kota Cimahi

Widuri Wulandari^a, Nia Dwi Yuniawanti^b

^{a,b} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani
e-mail: ^a widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id, ^b yuniawantiii2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaborasi dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi, mengidentifikasi peran aktor kunci, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Pada tahun 2025, tepatnya pasca Idul Fitri, Kota Cimahi ditetapkan darurat sampah dikarenakan meningkatnya timbulan sampah hingga mencapai 500 ton di 14 TPS, dengan keterbatasan ritase pengangkutan menuju TPA Sarimukti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan resmi pemerintah daerah terkait penanganan darurat sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan, regulasi, dan pelatihan teknis bagi pengangkut sampah; masyarakat berkontribusi dalam pemilahan dan pengolahan mandiri sampah organik; sementara sektor swasta mendukung melalui pengembangan teknologi komposting, maggotisasi, dan insinerator. Proses kolaboratif diperkuat melalui forum dialog yang menghasilkan kesepakatan jadwal pengangkutan, pemanfaatan teknologi, dan insentif warga. Implementasi kolaborasi ini meningkatkan tingkat pemilahan sampah hingga 70 persen dan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan strategis yang mampu memperkuat efektivitas penanganan darurat sampah sekaligus menjadi model tata kelola berkelanjutan yang dapat direplikasi di daerah lain.

Kata Kunci: *collaborative governance*; darurat sampah; pengelolaan sampah.

Collaborative Governance in Emergency Waste Management in Cimahi City

Abstract

This study analyzes the governance of collaboration in waste emergency management in Cimahi City following a crisis period in 2025 where waste generation reached 500 tons with restricted access to the Sarimukti landfill. Using a literature review method involving academic sources, policy documents, and official reports, the research identifies the roles of key actors and analyzes factors influencing the collaboration's success. The findings reveal a robust collaborative framework where the government acts as a facilitator, providing essential regulations and technical training. The community plays a critical role through waste sorting and independent organic processing, while the private sector supports by developing technologies such as composting, maggotization, and incinerators. Dialogue forums effectively produced agreements on transportation logistics, technology use, and incentives. The implementation of this collaborative governance successfully increased the waste sorting rate to 70% and significantly shifted community behavior toward active waste management. This study concludes that collaborative governance is a strategic and effective approach for enhancing the resilience and effectiveness of emergency waste management, establishing a sustainable model for potential replication in other regions facing similar environmental challenges.

Keywords: *collaborative governance*; waste emergency; waste management.

A. PENDAHULUAN

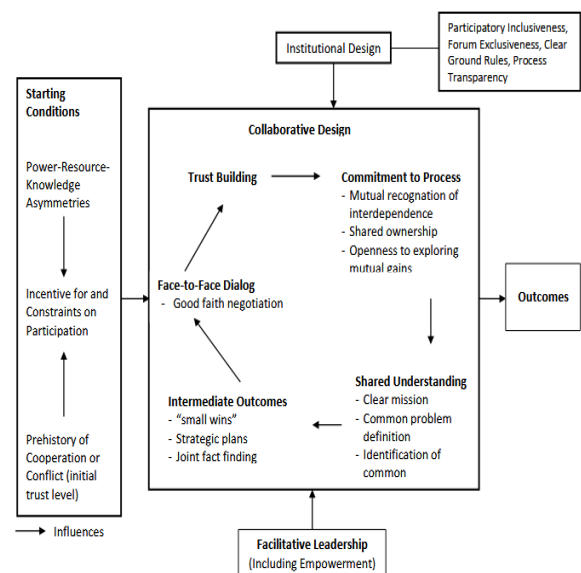
Indonesia sebagai negara berkembang mengalami peningkatan volume sampah yang signifikan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Kota Cimahi sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat turut mengalami persoalan serupa dengan timbunan sampah mencapai 231 ton per hari. Lonjakan volume sampah ini menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dilansir dari (Jaya, 2025) kondisi kritis terjadi pada tahun 2025 ketika Kota Cimahi menetapkan status darurat sampah dengan penumpukan sampah di 14 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) mencapai sekitar 500 ton pasca perayaan Idul Fitri. Pengelolaan sampah mengalami hambatan terutama terkait keterbatasan ritase pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang hanya tersedia 17 ritase per hari.

Permasalahan sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sulit diselesaikan di kota-kota besar. Maka untuk itu, perlu kolaborasi antar beberapa pihak untuk menyelesaikan permasalahan sampah di suatu daerah.

Masalah sampah merupakan masalah bersama, masalah rumah tangga, instansi pemerintah, sektor swasta, karena sampah dihasilkan oleh kita semua. Untuk itu, penanganannya pun harus dilakukan bersama, karena tidak bisa hanya dilakukan salah satu pihak (Sufianti, 2011). Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin sinergitas atau kolaborasi antar pemanggu kepentingan baik pemerintah maupun tidak dalam merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi maupun evaluasi (Rinaldoa & Rahayu, 2019).

Collaborative Governance menurut (Ansell & Gash, 2008) *Collaborative Governance*

dimaknai sebagai jenis pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal. Proses ini berfokus pada konsensus, pertimbangan, dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik, atau mungkin juga berkaitan dengan manajemen program atau aset publik. Pendapat senada turut dikemukakan oleh (Bingham, 2010), menurutnya makna *collaborative* yang melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu; aktor-aktor ini bekerja sama di banyak sektor, bukan hanya di satu. Karena pemerintahan adalah suatu sistem pemerintahan, *collaborative governance* adalah suatu sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan negara dan non-negara dalam bekerja sama dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama.



Gambar 1. Model of Collaborative Governance
Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

Model *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Setiap aktor memiliki latar belakang yang berbeda pada tahap awal kondisi dalam relasi antar stakeholder, yang dapat menyebabkan hubungan asimetris dalam relasi yang sedang berlangsung.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Mengutip dari Ryan dalam Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga unsur kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- Memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. *Institutional Design* (Desain istitusional)

Desain Istitusional mengacu pada protokol dan aturan dasar untuk kolaborasi. Legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi adalah hal yang paling penting. Pemerintah harus selalu terbuka dan inklusif dalam proses kolaborasi.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)

Kolaborasi didefinisikan sebagai perkembangan tahapan dalam model proses kolaborasi. Menurut Gray dalam Ansell dan Gash, ada tiga tahap proses kolaborasi: *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Faktor-faktor berikut membentuk kolaboratif, yaitu:

- Dialog tatap muka (*Face to face*)
- Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

d. *Share Understanding*

e. Hasil Sementara

Kajian literatur sebelumnya yang dilakukan oleh (Winursita & Johan, 2024) berjudul “Strategi Literasi Sampah dalam Penanggulangan Masa Tanggap Darurat Sampah” menjelaskan bahwa pemerintah daerah kota Cimahi masih menghadapi tantangan terkait dengan literasi dan edukasi mengenai penanggulangan sampah. Selain itu, penelitian senada yang dilakukan oleh (Avitadira & Indrawati, 2023) berjudul “Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance” menjelaskan bahwa Collaborative governance dalam penanganan sampah di DKI Jakarta sudah menunjukkan hasil (pengurangan sampah, teknologi RDF, manfaat ekonomi), tetapi praktik kolaborasi belum optimal karena komunikasi, musyawarah, dan integrasi program antar pihak belum terwujud secara menyeluruh.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada eksplorasi peran *collaborative governance* dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi pada tahun 2025. Artikel ini menganalisis bagaimana sinergi antar berbagai aktor mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, aparat kelurahan, masyarakat, hingga penyedia layanan pengangkutan sampah, dapat mengatasi krisis sampah yang muncul akibat melonjaknya volume sampah dan keterbatasan fasilitas pengangkutan. Pendekatan ini diharapkan menjadi model yang inovatif dalam tata kelola pengelolaan sampah yang menghadapi dinamika dan risiko darurat.

Permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut. Hipotesisnya bahwa keterlibatan aktif seluruh

pemangku kepentingan secara terkoordinasi mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian darurat sampah dan memitigasi dampak negatifnya.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme *collaborative governance* dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi, mengidentifikasi aktor kunci serta peran masing-masing, dan memberikan rekomendasi tata kelola pengelolaan sampah berbasis kolaborasi yang dapat diaplikasikan dalam konteks serupa.

B. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode utama dalam menggali, memahami, dan menganalisis persoalan terkait praktik *collaborative governance* dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi. Studi pustaka dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang meliputi pencarian, pengumpulan, evaluasi kritis, dan sintesis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kerja sama lintas aktor dalam menghadapi krisis persampahan yang mendesak.

Mengutip dari (Supriyadi, 2016), studi pustaka bertujuan memperoleh data dan informasi dari berbagai referensi tertulis guna menunjang proses analisis secara konseptual dan sistematis. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap buku-buku tentang tata kelola lingkungan, artikel dalam jurnal ilmiah mengenai kolaborasi dan pengelolaan sampah, laporan instansi pemerintah daerah terkait kebijakan darurat sampah, dokumen regulasi nasional maupun daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas implementasi *collaborative governance* dalam isu lingkungan dan pelayanan publik.

Analisis kritis terhadap literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarpemangku kepentingan, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas tata kelola darurat sampah di Kota Cimahi. Hasil analisis menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran mengenai peran *collaborative governance* sebagai instrumen strategis dalam penanganan krisis persampahan.

C. PEMBAHASAN

Starting Condition (Kondisi Awal)

Darurat sampah di Kota Cimahi pada tahun 2025 berawal setelah perayaan Idul Fitri, ketika terjadi penumpukan sampah yang signifikan di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS). Hal ini didukung oleh pernyataan Wakil Walikota Cimahi dalam (Kurniawan, 2025), “Cimahi kita nyatakan sebagai status darurat sampah, karena semenjak lebaran dan sampai sekarang sampah menumpuk di mana-mana”. Dilansir dari (Anshory, 2025), penumpukan sampah ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengangkutan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang mendapatkan alokasi terbatas, hanya sekitar 17 ritase per hari, sehingga tidak mampu menampung lonjakan volume sampah pasca Lebaran. Akibatnya, sampah menumpuk hingga mencapai sekitar 500 ton di 14 TPS resmi maupun TPS liar.

Hal ini menimbulkan keluhan warga karena bau, potensi penyakit, dan gangguan lingkungan (Anshory, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan kapasitas pengelolaan, ditandai dengan keterbatasan armada, tenaga kerja, dan fasilitas pengolahan. Masalah semakin diperparah oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak awal, sehingga sampah sulit ditangani. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dan kapasitas kolaborasi antarpemangku kepentingan masih perlu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

.....POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG.....

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

ditingkatkan agar pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah di Kota Cimahi bukan menjadi isu yang baru. Berbagai strategi telah dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengalolaan Sampah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Kota Cimahi telah menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Rycycle*). Salah satu tujuan penerapan konsep ini adalah mengurangi sampah pada sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat dan mengubah sikap masyarakat terhadap sampah.

Startegi lain yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan hadirnya Gerakan Grak Ompimpah (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah) dan adanya Bank Sampah serta adanya inovasi “Awasi Koma” atau Kawasan Pengelolaan Sampah Menuju Sirkular Ekonomi Mandiri. Namun dengan sudah adanya beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi ini, tetap menimbulkan tumpukan sampah yang terjadi pasca Idul Fitri 2025.



Gambar 2. Tumpukan Sampah di TPS Cibeber

Sumber: PPID Kota Cimahi (2025).

Tumpukan sampah yang semakin parah di berbagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Cimahi yang menyebabkan Pemerintah Kota menetapkan status Darurat Sampah untuk

periode 14 April hingga 14 Mei 2025. Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor 660/Kep.1792-DLH/2025 tentang Status Tanggap Darurat Sampah.



Gambar 3. Darurat Sampah Kota Cimahi
Sumber: PPID Kota Cimahi (2025).

Pada masa darurat sampah, Pemkot Cimahi fokus pada pembersihan TPS dan sosialisasi pemilihan sampah kepada masyarakat. Pemkot menghentikan sementara pelayanan penarikan sampah dari rumah tangga pada 21-27 April 2025 untuk pembersihan, dan mulai 28 April 2025 menerapkan jadwal pemilahan sampah dan mengeluarkan kebijakan “No Pilah, No Angkut” untuk sampah yang tidak dipilah mulai 5 Mei 2025.

Kepemimpinan Fasilitatif

Pemerintah Kota Cimahi, dipimpin langsung Wali Kota Ngatiyana, menunjukkan peran kepemimpinan kuat dan fasilitatif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penetapan status darurat sampah dan pengambilan kebijakan untuk pemberhentian sementara terhadap pengangkutan sampah masyarakat selama satu pekan (21 April 2025 s.d. 25 April 2025) untuk melakukan pembersihan tumpukan sampah (PPID Kota Cimahi, 2025). Pemerintah Kota Cimahi juga mengerahkan sumber daya aparat

keamanan seperti TNI-Polri, serta institusi terkait untuk mendukung pembersihan. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Cimahi juga mencakup pengenalan inovasi teknologi pengolahan sampah (*incinerator*) serta dorongan untuk perlunya pemilahan sampah oleh masyarakat dengan aturan "*no pilah no angkut*" pasca masa darurat (Gunawan, 2025). Hal ini memfasilitasi dialog dan koordinasi antarpihak untuk menciptakan lingkungan yang kembali bersih dan nyaman.

Pemkot Cimahi di bawah kepemimpinan Ngatiyana dan Adhithia Yudisthira (Kang Adit) sangat berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Cimahi. Melibatkan banyak pihak seperti Forkopimda Kota Cimahi, Kejaksaan Negeri, Polres Cimahi, Kodim 0609 Cimahi dan DPRD Kota Cimahi merupakan langkah konkret untuk mengatasi darurat sampah di Kota Cimahi.

Demi memastikan kelancaran dalam proses pengangkutan sampah, Wakil Wali Kota Cimahi Adhithia Yudisthira beserta jajaran terkait meninjau langsung proses pemberian (*clean up*) di Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Berbagai strategi dan keterlibatan banyak pihak dalam penanganan darurat sampah mencerminkan tanggung jawab dari Walikota Cimahi dan jajarannya dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, membangun sinergi antar lembaga, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kota dan kualitas hidup masyarakat.

Institutional Design (Desain Institusional)

Pemerintah Kota Cimahi menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 660/Kep.1792-DLH/2025 yang menetapkan Status Tanggap Darurat Sampah sebagai landasan hukum

sementara dalam mengatur tata kelola sampah selama masa darurat (Rahadhyhan, 2025). Melalui kebijakan ini, diterapkan sistem pembatasan dan penjadwalan pengangkutan sampah dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik, sehingga proses pengelolaan lebih sistematis, teratur, dan efisien.

Melansir dari (syncore, 2025), penguatan kelembagaan dilakukan dengan memaksimalkan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertugas mendukung operasional teknis, serta pembentukan forum konsultasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berfungsi sebagai ruang komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah bersama. Upaya ini dimaksudkan untuk membangun kolaborasi yang lebih solid dan mengurangi potensi miskomunikasi.

Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga diperkuat melalui pemberlakuan sanksi tegas bagi warga yang masih membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi bagian dari desain institusional yang tidak hanya menata aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menjaga kepatuhan kolektif masyarakat, sehingga tata kelola sampah dalam kondisi darurat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki beberapa program untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Cimahi. Dalam status darurat sampah, DLH melakukan serangkaian tindakan, seperti pengangkutan dan pembersihan tumpukan sampah di TPS, mengaktifkan *incinerator* untuk mengolah sampah di TPS, dan mengubah residunya menjadi produk lain, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga agar dapat mengurangi beban TPA dan

memungkinkan pengangkutan sampah secara optimal. Sosialisasi yang dilakukan DLH bekeja sama dengan pihak kelurahan dan juga RT/RW. Selain itu, keterlibatan petuga di lapangan sangat berpengaruh dalam penyelesaian sampah, ketersediaan armada pengangkut sampah, dan pengawasan serta pengendalian penumpukan sampah di TPA dan TPS.

Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah menunjukkan keterlibatan aktif dari tiga aktor utama, yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan kerangka regulasi sekaligus instrumen kebijakan yang mendukung implementasi pemilahan dan pengolahan sampah. Melansir dari (Rahadhyan, 2025), upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi serta pelatihan terhadap kurang lebih 1.000 penggerobak pengangkut sampah yang diarahkan untuk memahami dan menerapkan teknik pemilahan sesuai kategori. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi secara berkelanjutan guna menjamin efektivitas kebijakan di lapangan.

Dilansir dari (Pradana, 2025) masyarakat memiliki peran strategis sebagai subjek utama dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemilahan sampah sejak dari sumber serta pengolahan mandiri sampah organik, antara lain melalui pembuatan kompos, biopori, maupun budidaya maggot. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Cimahi sangat penting. Masyarakat diminta untuk memilah dan memilih sampah rumah tangga organik dan non-organik guna mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mengurangi volumen sampah yang dibuang ke TPA, serta mendorong pemanfaatan kembali daur ulang dan pengomposan.

Namun memang beberapa dari masyarakat belum bisa membedakan mana sampah organik dan non-organik. RT/RW atau Kader Grak Ompimpah sebaiknya menjelaskan dulu yang mana termasuk sampah organik dan non-organik, dengan demikian masyarakat bisa lebih mudah untuk memilah milih sampah. Kader Grak Ompimpah memberikan edukasi insentif pemilihan dan pengomposan.

Sementara itu, sektor swasta dilibatkan secara signifikan dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah. Keterlibatan ini mencakup kerja sama dalam program komposting dan maggotisasi untuk mengurangi volume sampah organik, serta pengembangan teknologi pengolahan modern yang lebih ramah lingkungan. Swasta berperan dalam menyediakan peralatan dan sistem pengolahan yang dapat mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola sampah (PPID Kota Cimahi, 2024). Dengan demikian, kontribusi sektor swasta tidak hanya menambah kapasitas teknis, tetapi juga melengkapi keterbatasan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah skala besar.

Adanya keterlibatan dari Kodim 0609 Cimahi dalam memberikan dukungan personal operasi pembersihan, serta berperan dalam pengekan disiplin masyarakat membuang sampah ke TPS, salah satunya adanya penjagaan di TPS oleh anggota TNI. Selain itu ada juga keterlibatan dari Satpol PP serta Polres dalam menjaga keamanan saat operasi kebersihan darurat, mengawasi jalannya distribusi armada dan mengatur lalu lintas truk sampah, dan penegakan hukum bagi pelanggaran yang membuang sampah sembarangan.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A juga terlibat dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi. Hal ini terjadi dikarenakan tertangkapnya 10 orang membuang sampah

sembarangan. Para pelaku ini menjalankan proses persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Kolaborasi multipihak ini diperkuat melalui forum dialog yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kolektif, antara lain penetapan jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis, serta pengembangan teknologi insinerator. Dilansir dari (Febriani, 2025), hasil implementasi menunjukkan peningkatan tingkat pemilahan hingga 70 persen. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi dalam membangun komitmen kolektif, meningkatkan partisipasi warga, serta mendorong transformasi perilaku masyarakat dari sekadar pembuang sampah pasif menjadi pengelola sampah aktif dan mandiri.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) terbukti menjadi pendekatan strategis dan efektif dalam menangani darurat sampah di Kota Cimahi, sekaligus mampu meningkatkan efektivitas tata kelola persampahan secara keseluruhan. Hipotesis penelitian yang menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat dan menuntaskan krisis darurat sampah telah terkonfirmasi. Kolaborasi multipihak ini membagi peran secara jelas: Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama, menyediakan kerangka kebijakan, regulasi, dan penguatan kapasitas teknis; Masyarakat mengambil tanggung jawab kritis melalui pemilahan sampah di sumber dan pengolahan mandiri sampah organik; sementara Sektor Swasta menyediakan dukungan teknologi modern seperti insinerator dan program daur ulang berkelanjutan. Kontribusi aparat penegak hukum sebagai pengawas juga

memastikan ketertiban selama proses implementasi.

Sinergi yang tercipta melalui forum dialog menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting, seperti penjadwalan pengangkutan yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan. Dampak nyata dari kolaborasi ini terlihat dari peningkatan signifikan tingkat pemilahan sampah hingga mencapai 70%. Pencapaian ini tidak hanya berhasil mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) selama masa darurat, tetapi juga secara fundamental mendorong transformasi perilaku kolektif masyarakat, menjadikan pengelolaan sampah sebagai budaya yang lebih peduli, mandiri, dan berkelanjutan.

Berdasarkan keberhasilan model kolaborasi ini, terdapat tiga rekomendasi utama untuk menjamin keberlanjutan dan penguatan tata kelola sampah di Kota Cimahi. Pertama, Pemerintah daerah harus segera memperkuat regulasi yang secara eksplisit berbasis kolaborasi, sekaligus melembagakan forum komunikasi antarpemangku kepentingan agar berjalan secara lebih reguler, partisipatif, dan memiliki daya ikat hukum yang kuat. Kedua, program literasi dan edukasi lingkungan wajib digencarkan secara masif di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah agar kesadaran akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat melembaga dan menjadi budaya kolektif sehari-hari. Ketiga, Sektor Swasta didorong untuk terus memperluas inovasi dan investasi pada teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, khususnya pada program daur ulang bernilai ekonomi tinggi (*waste to material*) dan inisiatif energi terbarukan (*waste to energy*), sehingga pengelolaan sampah dapat berkontribusi positif pada ekonomi daerah.

REFERENSI

- Adiyatama, S., Sufianti, E., & Rahman, A. (2024). Strategi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Bank Sampah Cinta Lingkungan di Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 20-33.
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Setiyono, B., Novira, A., & Sutiyono, W. (2024). Self-organizing volunteers as a grassroots social innovation: the contribution and barrier to empowerment and collaborative governance in stunting intervention. *Development Studies Research*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357102>
- Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). Applying Collaborative Governance As An Intervention In Stunting Reduction An Empirical Community Empowerment Model In Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>
- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Anshory, W. W. (2025, April 22). *Darurat Sampah di Cimahi: 500 Ton Menumpuk, Layanan Pengangkutan Dihentikan Sementara*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/04/22/115156788/darurat-sampah-di-cimahi-500-ton-menumpuk-layanan-pengangkutan#:~:text=Setiap%20harinya%2C%20Cimahi%20hanya%20mendapatkan%20jatah%2017,untuk%20mengatasi%20lonjakan%20volume%20sampah%20pascalibur%20>
- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Bingham, B. (2010). Building The Legal Infrastructur For Collaborative Governance.
- Dzuliazahra, S., Ramdani, E. M., Gedeona, H. T. W., & Nurliawati, N. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 111-117.
- Gunawan, A. (2025, April 25). *DLH Cimahi Terapkan Aturan No Pilah, No Angkut*. Retrieved from rri.co.id: <https://rri.co.id/daerah/1474233/dlh-cimahi-terapkan-aturan-no-pilah-no-angkut>
- Jaya, E. E. (2025, April 22). *Cimahi Darurat Sampah: 500 Ton Menumpuk, Layanan ke Rumah Tangga Stop Sementara*. Retrieved from Kompas.com: <https://bandung.kompas.com/read/2025/04/22/080403278/cimahi-darurat-sampah-500-ton-menumpuk-layanan-ke-rumah-tangga-stop>
- Kurniawan, R. (2025, April 21). *Cimahi Tetapkan Status Darurat Sampah, 500 Ton Menumpuk Pascalebaran*. Retrieved from Metrotvnews: <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVLAV-cimahi-tetapkan-status-darurat-sampah-500-ton-menumpuk-pascalebaran>
- Oktoyani, R., Sufianti, E., & Gedeona, H. T. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(2), 109-123.
- PPID Kota Cimahi. (2025, Juni 12). *Cimahi Tetapkan Status Darurat Sampah Pascalebaran 2025*. Retrieved from PPID Kota Cimahi: <https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-lingkungan-hidup-cimahi-tetapkan>

- status-darurat-sampah-pascalebaran-2025
- Rahadhyhan, A. (2025, April 21). *Penarikan Sampah di Kota Cimahi Dihentikan Sementara, Catat Tanggal dan Cara Atasi Sampahnya*. Retrieved from cimahikota.go.id: <https://cimahikota.go.id/berita/detail/83046-penarikan-sampah-di-kota-cimahi-dihentikan-sementara-catat-tanggal-dan-cara-atasi-sampahnya>
- Ramdani, E. M., Abubakar, R. R. T., Artisa, R. A., Pratiwi, A. D. R., Harahap, A. S., & Zulvia, P. (2024). Penguatan Bank Sampah: Pendekatan Inovatif Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 53-65.
- Rinaldoa, E., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) (Collaborative Waste Management between the Community and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) (Cases of Waste Management in Jembatan Lim. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 1-13. https://www.researchgate.net/publication/334728959_Penanganan_Sampah_Secara_Kolaboratif
- Sendari, W. N., & Sufianti, E. (2024). Perspektif Triple Bottom Line Pada Praktik Pengelolaan Berkelanjutan Bank Sampah Induk Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 211-219.
- Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(3), 322-329.
- Sufianti, E., & Ramdani, D. F. (2020). Rintisan Social Entrepreneurship Dalam Menangani Permasalahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Pelangi Galaxy)[Pioneering Social Entrepreneurship In Handling Household Waste Problems (Case Study Of The Pelangi Waste Bank)]. *SeTIA MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39-47.
- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Syncore. (2025, May 26). *Langkah Strategis Kota Cimahi Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Warga dan Transformasi BLUD*. Retrieved from blud.co.id: <https://blud.co.id/wp/langkah-strategis-kota-cimahi-melalui-pengelolaan-sampah-berbasis-warga-dan-transformasi-blud/>
- Winursita, W., & Johan, R. C. (2024). Strategi Literasi Sampah dalam Penanggulangan Masa Tanggap Darurat Sampah. *JKKI: Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*.
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cilaku). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83-96.